

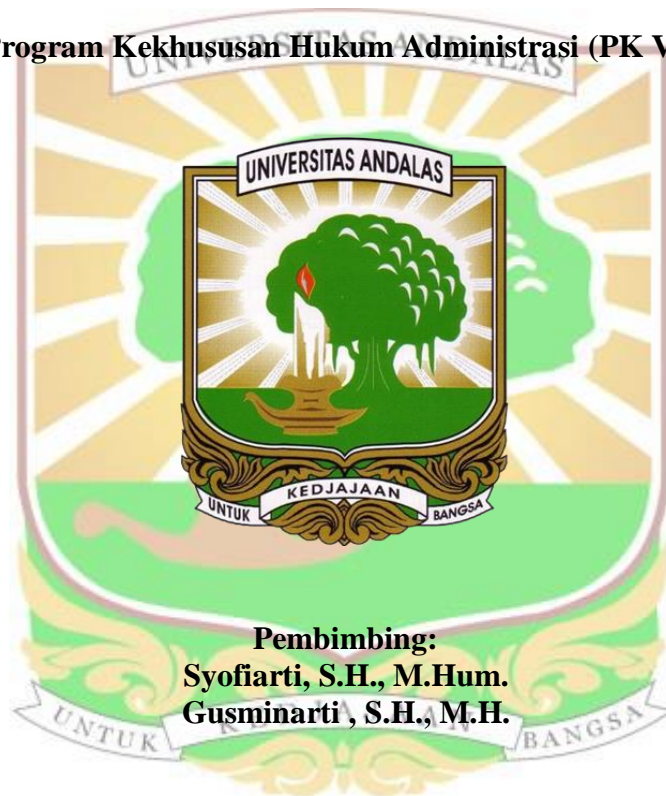
SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN *E-MONEY* BRIZZI
DALAM PEMBAYARAN JASA BUS TRANS PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:
INDRI TRI NOVITA
BP. 1610112042**

Program Kekhususan Hukum Administrasi (PK VII)



**Pembimbing:
Syofiarti, S.H., M.Hum.
Gusminarti, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN *E-MONEY* BRIZZI DALAM PEMBAYARAN JASA BUS TRANS PADANG

(Indri Tri Novita, 1610112042, Program Kekhususan Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Peraturan kebijakan menggunakan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang merupakan program yang dicanangkan Dinas Perhubungan. Program ini pertama kali diterapkan pada pembayaran jasa Trans Padang dengan Brizzi. Brizzi merupakan salah satu produk kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) dan pada saat ini hanya Bank Rakyat Indonesia yang mampu menyediakan jasa transaksi non tunai. Pada dasarnya peraturan kebijakan ini hanya sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1) Apakah peraturan kebijakan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?; 2) Apa permasalahan yang dialami pada pelaksanaan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?; 3) Apa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penggunaan *e-money* Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Peraturan kebijakan ini bertentangan dengan hukum positif, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keadaan penting dan mendesak; 2) kendala yang dihadapi yaitu perilaku masyarakat yang masih mempercayai uang tunai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran non tunai pada pelayanan publik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan penerbit penyedia layanan transaksi non tunai, dan harga kartu yang menurut masyarakat cukup mahal; 3) upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah melakukan sosialisasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya.

Kata Kunci: *e-money* Brizzi, peraturan kebijakan, Trans Padang